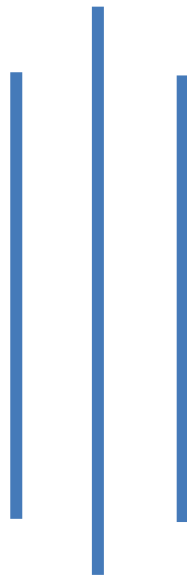


BAHAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG
TELP. 0711-310633 FAX 0711-319819 KODE POS 30137**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Program Kegiatan Tahun 2019

Berdasarkan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019, alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp169.989.889.500,- (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp152.323.260.466,- (seratus lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 89,61%. Rincian alokasi anggaran pada APBD dan APBD-P Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel tahun 2019 tersebut terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp138.215.860.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan bagi PNS dan insentif pemungutan pajak daerah dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai Rp125.162.777.335,- (seratus dua puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 90,56%
- Belanja Langsung sebesar Rp31.774.029.500,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 Program dan 37 Kegiatan, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai Rp27.160.483.131,- (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 85,48%.

Rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp16.526.718.500,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp13.835.414.686- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh delapan enam rupiah) atau sebesar 85,89% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp40.218.500,- (empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 38,64%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 39,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1.640 perangko dan 288 surat / berkas / laporan di lingkungan Bapenda yang terkirim.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang dianggarkan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp1.405.080.131,-(satu milyar empat ratus lima juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)atau sebesar 78,94%.Realisasi fisikkegiatan ini sebesar 79,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 38 rekening telepon, 138 Rekening Air, 399 Rekening Listrik.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.

- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang di anggarkan.
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp278.667.350,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 92,89%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 50 unit kendaraan Dinas / Operasional R4 yang mendapat jasa asuransi.
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp900.030.034,- (sembilan ratus juta tiga puluh ribu tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 66,30%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 66,30%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 64 unit kendaraan dinas/operasional R4 dan 22 unit kendaraan dinas/operasional R2 terpelihara.
 - Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang di anggarkan.
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp1.105.300.000,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp1.030.857.900,- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 93,26%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang

dicapai dari kegiatan ini adalah 22 Kantor yang melaksanakan jasa Kebersihan Kantor.

- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp863.494.542,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 90,32%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah 5 jenis alat tulis kantor yang disediakan.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp866.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp670.929.470,- (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 77,47%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 78,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 35 Jenis (cetakan umum, cetakan kutipan, cetakan laporan).
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp388.750.300,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 95,28%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 21 jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan.
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp35.954.872,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 99,87%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 6.959 exemplar Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan Bapenda yang disediakan.

- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp0,- (nol rupiah) atau mencapai 0%.
- Permasalahan yang dihadapi adalah tabung pemadam kebakaran masih layak dan belum diperlukan adanya perawatan.
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp161.527.500,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,15%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1.618 nasi kotak dan 9.929 snack kotak Makan dan Minum peserta rapat Bapenda yang disediakan.
- 12) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Rp8.408.392.000,- (delapan milyar empat ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp7.091.513.380,-(tujuh milyar sembilan puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 84,34%. Realisasi fisikkegiatan ini sebesar 85,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 150 orang yang menerima honorarium, dan 17 gedung Kantor.
- 13) Penyediaan Jasa Tutor SKJ Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar 93,18%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 40 kali pelaksanaan SKJ.
- 14) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Rp184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp162.668.650,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 88,41%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 89,00%. Output

yang dicapai dari kegiatan ini adalah 20 Kantor yang disediakan peralatan dan bahan pembersih.

- 15) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp818.101.857,- (delapan ratus delapan belas juta seratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,90%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 91 kali pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan 53 kali pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp7.716.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp7.324.582.088,-(tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,64% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp313.972.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 74,76%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 75,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Gedung dibangun.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp3.346.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau sebesar 92,94%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 8 unit kendaraan dinas R4 yang disediakan.
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp394.080.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,52%. Realisasi fisik

kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 gedung kantor yang disediakan.

- 4) Pengadaan Mebeleur Kantor Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Realisasi keuangan sebesar Rp396.900.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,23%.Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%.Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 4 jenis mebeleur kantor yang disediakan.
- 5) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp2.128.410.598,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,46%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 4 jenis peralatan Gedung kantor yang disediakan.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp217.901.700,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 99,05%.Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Gedung Kantor yang dipelihara.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp321.098.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 98,80%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 2 Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp206.218.890,- (dua ratus enam juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 97,73%. Realisasi

fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 22 unit gedung kantor.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp253.900.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp193.212.294,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 85,86% , dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 72,89%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 73,00%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 6 orang pegawai yang mengikuti Pelatihan, Seminar, Simposium dll.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll adalah Pejabat yang ditunjuk dalam pelatihan dan seminar tidak dapat mengikuti pelatihan dan seminar tersebut karena kendala waktu yang bertepatan dengan jadwal sebelum pelatihan dan seminar sebelumnya.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll adalah di usahakan untuk berpartisipasi dalam seminar dan pelatihan yang sudah dijadwalkan.

2) Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Rp30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp21.006.170,- (dua puluh satu juta enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 68,31%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- 3) Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Rp40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp36.458.422,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 89,58%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah dua kali pelaksanaan Diklat yang diikuti 3 orang pegawai.
- 4) Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A) Rp25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp20.470.309,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau sebesar 79,50%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Benchmarking Peningkatan SAKIP.
- 5) Bimbingan Teknik SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A) Rp23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp18.327.393,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 77,33%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknik SAKIP.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.122.705.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp1.462.910.876,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 69,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat Rp170.600.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp40.537.500,- (empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah) atau mencapai 23,76%.

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 24,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 21 kali Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat adalah Kurangnya personil UPTB yang melakukan Kegiatan ini.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat adalah akan dioptimalkan dalam operasional Tim OPAD
- 2) Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air dengan anggaran Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau mencapai 8,99%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 9,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 kali pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air yang terlaksana.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah Kurangnya personil UPTB yang melakukan Kegiatan ini dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah akan dilakukan koordinasi dengan Polair Polda Sumsel.
- 3) Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 dengan anggaran Rp310.280.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp112.301.500,- (seratus dua belas juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 36,19%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 36,19%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 21 kali Pelaksanaan razia kendaraan bermotor R2 dan R4 yang terlaksana.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 adalah Kurangnya personil pendukung yaitu pihak kepolisian dalam melakukan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 dan belum sinkronnya

jadwal pelaksanaan dengan Ditlantas Polda Sumsel sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini.

- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 adalah akan dilakukan penambahan personil pendukung dan sinkronisasi pada pelaksanaan dengan Ditlantas Polda Sumsel
- 4) Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp450.300.000,- (empat ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp302.769.991,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 63,24%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 68,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 12 kali dalam daerah dan 4 kali luar daerah Kantor Bapenda Prov. Sumsel.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah adalah waktu yang tidak leluasa bagi kegiatan pelaksanaan pemeriksaan atau koordinasi pengawasan di akhir tahun 2019.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah adalah tercukupya penganggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk sehingga pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dari awal hingga akhir tahun.
- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Patda dengan anggaran Rp146.725.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp141.042.122,- (seratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 96,13%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 11 kali reonsiliasi paja bulanan dan 12 kali koordinasi ke luar daerah.

- 6) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp568.910.765,- (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 87,52%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 88%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 3 kali koordinasi yang dilaksanakan.
- Dengan pendampingan Kopsurgah KPK seluruh objek wajib pungut (Wapu) Perusahaan diundang datang ke Bapenda, sehingga mengurangi frekuensi pelaksanaan kegiatan Tim OPAD.
- 7) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan anggaran Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp29.260.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 58,52%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 9 kali koordinasi konsultasi dan monitoring yang dilaksanakan.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah belum optimalnya koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah berupaya untuk lebih mengoptimalkan lagi terhadap kegiatan tersebut agar terlaksana dengan baik di tahun mendatang dengan cara meningkatkan koordinasi, evaluasi dengan OPD pemungut Retribusi maupun BUMD dalam rangka peningkatan PAD.
- 8) Media Informasi dan publikasi Pajak Daerah dengan anggaran Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp265.498.998,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar

r84,02%. Realisasi fisikkegiatan ini sebesar 85,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 kali kegiatan yang dilaksanakan.

V. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp5.154.706.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp4.344.363.187,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 85,95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah Rp4.828.056.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp4.024.941.187,- (empat milyar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau mencapai 83,37%. Realisasi fisikkegiatan ini sebesar 85,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Sistem (Bandwith kapasitas 114 Mbps + 1 Aplikasi.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah adalah masih melakukan sistem kontrak dengan penyedia jasa provider dikarenakan VPN IP merupakan belanja rutin di Bapenda Prov. Sumsel, penambahan 8 (delapan) UPTB baru yang belum teraliri bandwith di 8 (delapan) UPTB tersebut di Tahun Anggaran 2019 dan belum bisa update aplikasi esamsat (Edempo) menjadi IOS di AppStore pengguna Iphone karena menunggu kesiapan dari pihak Diltantas polda sumsel, yang sekarang hanya bisa berjalan di android melalui Playstore serta mengupgrade hardware perangkat server yang kurang maksimal dikarenakan Server Kesamsatan Bapenda Prov. Sumsel sudah sewajarnya diganti karena batas usia server 5 (lima) tahun, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang kurang maksimal dikarenakan waktu yang terbatas di anggaran APBD Perubahan Tahun 2019.

- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah adalah menjadikan salah satu penyedia jasa provider cukup dengan MOU (**Memorandum of Understanding**) atau Nota Kesepahaman dan diteruskan dengan perjanjian kerjasama dikarenakan VPN IP merupakan belanja rutin di Bapenda Prov. Sumsel, pergantian server kesamsatan pada Bapenda Prov. Sumsel yang sewajarnya diganti karena batas usia server 5 (lima) tahun.
- 2) Pemeliharaan Database Colocation Server Rp326.650.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp319.422.000,- (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 97,79%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Server data base.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Pemeliharaan Database Colocation Server adalah dari pagu DPA yang ada teralisasi dengan ada nya penawaran dan HPS (harga perhitungan sendiri), dan Ingin menjadikan server di BP Batam (Database Colocation Server) menjadi server yang utama (main) kalau terjadi permasalahan atau trouble server yang ada di Bapenda Prov. Sumsel maka server di BP Batam yang akan menghendel.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Database Colocation Server adalah dengan menambahkan jaringan backhole uptb server di BP Batam (Database Colocation Server) akan di buat **Redundant Link** (skema penggunaan jalur data ganda untuk komunikasi antara setiap lokasi pelayanan UPTB Samsat dan Bapenda), **Automatic Failover** (digunakan sebagai perangkat pemantau kondisi jalur data yang *otomatis* mengalihkan *trafik* lewat jalur data lain ketika terpantau gangguan pada salah satu jalur data), **Bonding** (sebuah teknologi yang memungkinkan agregasi lebih dari satu interface ethernet dan menggabungkan kedalam satu link virtual sehingga kita akan mendapatkan troughput bandwith yang lebih besar) kalau terjadi

permasalahan atau trouble server yang ada di Bapenda Prov. Sumsel maka server di BP Batam yang akan menghendel atau menjadi server utama (main).

2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk pegawai UPTB Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan per Desember 2019 berjumlah 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang pegawai, terdiri dari 68 (enam puluh delapan) orang Golongan IV, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) orang Golongan III, 32 (tiga puluh dua) orang Golongan II dan 1 (satu) orang Golongan I, secara rinci disajikan dalam bentuk tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Data Pegawai Bapenda Sumsel berdasarkan tempat tugas,
golongan dan jenis kelamin Tahun 2019

NO.	TEMPAT TUGAS	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
1.	BAPENDA Prov. Sumsel	-	1	55	21	77	31	46
2.	UPTB Kota Palembang I	1	3	31	3	38	23	15
3.	UPTB Kab. MUBA I	-	2	10	2	14	5	9
4.	UPTB Kab. OKI I	-	1	9	0	10	7	3
5.	UPTB Kab. OKU	-	-	12	1	13	7	6
6.	UPTB Kab. Muara Enim	-	3	6	3	12	6	6
7.	UPTB Kab. Lahat	-	-	7	2	9	9	0
8.	UPTB Kab. MURA	-	-	7	2	9	5	4
9.	UPTB Kota Prabumulih	-	2	8	0	10	9	1
10.	UPTB Kota Pagar Alam	-	-	5	3	8	6	2
11.	UPTB Kota Lubuk Linggau	-	2	5	1	8	4	4
12.	UPTB Kab. Banyuasin	-	1	10	2	13	9	4
13.	UPTB Kab. Ogan Ilir	-	1	13	0	14	8	6
14.	UPTB Kab. OKUT I	-	2	12	1	15	10	5
15.	UPTB Kab. OKU Selatan	-	1	4	3	8	7	1
16.	UPTB Kab. Empat Lawang	-	2	3	1	6	6	-

NO.	TEMPAT TUGAS	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
17.	UPTB Kota Palembang II	-	4	15	1	20	13	7
18.	UPTB Kab. MUBA II	-	2	4	1	7	5	2
19.	UPTB Kab.OKI II	-	-	5	1	6	6	-
20.	UPTB Kab.OKUT II	-	-	3	1	4	4	-
21.	UPTB Kab. MURATARA	-	1	5	1	7	7	-
22.	UPTB Kab. PALI	-	2	3	1	6	3	3
23.	UPTB Pusat Pengelolaan dan Aplikasi Pendapatan	-	-	4	2	6	2	4
24.	UPTB Kota Palembang III	-	1	10	4	15	6	9
25.	UPTB Kota Palembang IV	-	-	16	-	16	8	8
26.	UPTB Kab. Muara Enim	-	-	6	1	7	4	3
27.	UPTB Kab. Ogan Ilir II	-	-	4	4	8	5	3
28.	UPTB Kab. Lahat II	-	-	5	1	6	4	2
29.	UPTB Kab. OKU II	-	1	6	-	7	6	1
30.	UPTB Kab. MURA II	-	-	5	2	7	6	1
31.	UPTB Kab. Banyuasin II	-	-	7	3	10	4	6
Jumlah		1	32	295	68	396	235	161

Ket : Data per Desember 2019

Tabel 2
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2019

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SLTP/ Sederajat	1
2.	SLTA/ Sederajat	44
3.	Sarjana Muda/ Sederajat	10
4.	Sarjana S1	189
5.	Pasca Sarjana	152
Jumlah		396

Ket : Data per Desember 2019

Tabel 3
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2019

No.	ESSELONERING	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II.a	1	Kepala Badan
2.	III.a	5	Sekretaris/Kepala Bidang/KUPTB
3.	III.b	30	Kepala UPTB
4.	IV.a	105	Kasubbag/Kasi Bapenda & UPTB
5.	Non Esselon	255	Staff
Jumlah		396	

Ket : Data per Desember 2019

Tabel 4
 Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
 Selatanyang telah mengikuti diklat penjenjangan Tahun 2019

No.	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	SPAMEN/ DIKLATPIM TK.II	-
2.	SPAMA/DIKLATPIM TK. III	1
3.	ADUM/DIKLATPIM TK.IV	4
	Jumlah	5

Ket : Data per Desember 2019

Ditinjau dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah cukup memadai dan telah mampu mengakomodir kebutuhan badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari segi kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah pegawai Bapenda yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang ada.

Tabel 5
 Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional

No.	JENIS DIKLAT/KURSUS	JUMLAH
1.	BENDAHARAWAN	5
2.	PATDA TYPE C	1
3.	KMP	2
4.	RETIKAT PATDA	1
5.	BIMBINGAN TEKNIS PRODUK HUKUM	1
6.	DIKLAT TEKNIS PBJ	5

Ket Ket : Data per Desember 2019

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana disajikan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kelompok jabatan fungsional, akan tetapi sampai dengan saat ini belum difungsikan. Kedepan diharapkan tenaga fungsional terkait fungsi yang ada, antara lain pejabat fungsional pajak, pejabat fungsional pranata komputer, pejabat fungsional perencana diakomodir dalam struktur organisasi badan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih optimal.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 6

Target dan Realisasi Keuangan Program /Kegiatan Tahun 2019

No.	Program / Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi	
			Keuangan	
			(Rp)	%
1	2	3	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 16.526.718.500	Rp 13.835.414.686	83,72
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 40.218.500	Rp 15.538.700	38,64
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.780.000.000	Rp 1.405.080.131	78,94
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp 300.000.000	Rp 278.667.350	92,89
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 1.357.608.000	Rp 900.030.034	66,30
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 1.105.300.000	Rp 1.030.857.900	93,26
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 956.000.000	Rp 863.494.542	90,32
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 866.000.000	Rp 670.929.470	77,47
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 408.000.000	Rp 388.750.300	95,28
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 36.000.000	Rp 35.954.872	99,87
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 4.000.000	Rp -	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 168.000.000	Rp 161.527.500	96,15
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Rp 8.403.392.000	Rp 7.091.513.380	84,34
13	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Rp 13.200.000	Rp 12.300.000	93,18
14	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Rp 184.000.000	Rp 162.668.650	89,00
15	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Rp 900.000.000	Rp 818.101.857	90,90
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 7.716.000.000	Rp 7.324.582.088	98,64
16	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 420.000.000	Rp 313.972.000	75,00
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 3.600.000.000	Rp 3.346.000.000	92,94
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 400.000.000	Rp 394.080.000	98,52
19	Pengadaan Mebeleur Kantor	Rp 400.000.000	Rp 396.900.400	99,23
20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.140.000.000	Rp 2.128.410.598	99,46

No.	Program / Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi	
			Keuangan	
			(Rp)	%
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp 220.000.000	Rp 217.901.700	99,05
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 325.000.000	Rp 321.098.500	98,80
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 211.000.000	Rp 206.218.890	97,73
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 253.900.000	Rp 193.212.294	85,86
24	Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll	Rp 133.000.000	Rp 96.950.000	72,89
25	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Rp 30.750.000	Rp 21.006.170	68,31
26	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Rp 40.700.000	Rp 36.458.000	89,58
27	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)	Rp 25.750.000	Rp 20.470.309	79,50
28	Bimbingan Teknik SAKIP Perangkat Daerah(DID Kinerja SAKIP	Rp 23.700.000	Rp 96.950.000	77,33
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.122.705.000	Rp 1.462.910.876	68,92
29	Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat	Rp 170.600.000	Rp 40.537.000	23,76
30	Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air	Rp 28.800.000	Rp 2.590.000	8,99
31	Razia Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4	Rp 310.280.000	Rp 112.301.500	36,19
32	Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah	Rp 450.300.000	Rp 302.769.991	67,24
33	Pengembangan dan Pengelolaan Patda	Rp 144.725.000	Rp 141.042.122	96,13
34	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rp 650.000.000	Rp 568.910.765	87,52
35	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.	Rp 50.000.000	Rp 29.260.000	58,52
36	Media Informasi dan Publikasi Pajak Daerah	Rp 316.000.000	Rp 265.498.998	84,02
V	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aplikasi Bidang Pendapatan Daerah	Rp 5.154.706.000	Rp 4.344.363.187	84,28
37	Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah	Rp 4.828.056.000	Rp 4.024.941.187	83,37

No.	Program / Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi	
			Keuangan	
			(Rp)	%
38	Pemeliharaan Database Colocation Server	Rp 326.650.000	Rp 319.422.000	97,79
	Jumlah	Rp 31.774.029.500	Rp 27.160.483.131	85,48

4. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sampai dengan saat ini Bapenda Prv Sumsel telah memiliki lebih dari 60 titik pelayanan pajak yang tersebar di 17 Kab/Kota se Sumatera Selatan.

a. Sarana gedung kantor

Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 16 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru, yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana pembangunan gedung kantor pada anggaran tahun 2021 untuk 5 gedung kantor UPTB Kab/Kota.

b. Sarana Kendaraan Operasional

Sarana kendaraan operasional sangat diperlukan dalam menunjang terjaminnya kelancaran operasional badan, berikut daftar kendaraan operasional yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah beserta UPTB kab/kota:

Tabel 7
Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 di Bapenda Prov. Sumsel

No.	Kantor Badan dan UPTB Kab/Kota	Kendaraan Roda Empat		Roda Dua
		Mobil	Pick up	
1.	Bapenda Prov.Sumsel	9 unit	2 unit	2 unit
2.	UPTB Kota Palembang I	3 unit	-	1 unit
3.	UPTB Kota Palembang II	3 unit	-	-
4.	UPTB Kota Prabumulih	2 unit	-	1 unit
5.	UPTB Kota Lubuk Linggau	3 unit	-	-
6.	UPTB Kab Banyuasin I	3 unit	-	2 unit
7.	UPTB Kab Empat Lawang	1 unit	1 unit	2 unit
8.	UPTB Kab Ogan Ilir I	2 unit	-	3 unit
9.	UPTB Kab Ogan Komering Ulu I	2 unit	-	-
10.	UPTB Kab Lahat	1 unit	-	2 unit
11.	UPTB Kab OKU Timur I	2 unit	-	1 unit
12.	UPTB Kab OKU Selatan	1 unit	-	2 unit
13.	UPTB Kota Pagar Alam	2 unit	-	2 unit
14.	UPTB Kab Musi Banyuasin I	1 unit	1 unit	1 unit
15.	UPTB Kab Muara Enim I	2 unit	1 unit	1 unit
16.	UPTB Kab Ogan Komering Ilir I	1 unit	1 unit	-

17.	UPTB Kab Musi Rawas	3 unit	-	1 unit
18.	UPTB Kab OKU Timur II	1 unit	-	1 unit
19.	UPTB Kab OKI II	1 unit	-	1 unit
20.	UPTB Kab Pali	1 unit	-	-
21.	UPTB Kab. MURATARA	1 unit	-	-
22.	UPTB Kota Palembang III	1 unit	-	-
23.	UPTB Kota Palembang IV	1 unit	-	-
24.	UPTB Kab. Muara Enim II	1 unit	-	-
25.	UPTB Kab. Ogan Ilir II	1 unit	-	-
26.	UPTB Kab. Lahat II	1 unit	-	-
27.	UPTB Kab. OKU II	1 unit	-	-
28.	UPTB Kab. MURA II	1 unit	-	-
Jumlah		56 unit	6 unit	23 unit

Ket. Data per akhir Des 2019

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemenuhan kendaraan operasional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah belum memadai mengingat 29 UPTB Kab/Kota yang perlu melakukan penagihan pajak sangat luas. Diharapkan kedepan jumlah kendaraan operasional yang dapat digunakan bertambah sehingga operasional badan dalam melakukan penagihan langsung (*door to door*) ke objek pajak berjalan lebih maksimal.

c. Sarana penunjang lainnya

Sampai dengan saat ini Badan Pendapatan Daerah telah memiliki lebih dari 60 titik layanan pajak yang berupa ; UPTB, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive thru, yang tersebar di 17 Kab/Kota.

✓ Samsat keliling

Badan pendapatan daerah memiliki unit pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2012 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak.

✓ Samsat Drive Thru

Pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTB Kota Palembang I bekerjasama dengan pihak terkait melalui sistem pembayaran Samsat Drive Thru. Pelayanan pembayaran pajak samsat DriveThru ini mulai beroperasi pada tahun 2012 yang lalu. Pada tahun 2018 ini, pelayanan samsat drive thru juga akan dibuka di UPTB Palembang II dan kedepan secara bertahap akan diperluas ke UPTB kab/kota lainnya.

✓ Samsat Samsat Mall

Merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu : PTC Mall, PIM, PS Mall.

✓ Samsat Corner

Salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan.

✓ Sarana IT

Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

Dalam rangka pengembangan pelayanan kepada wajib pajak perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan maupun perencanaan strategis penambahan titik-titik pelayanan berupa pojok-pojok pelayanan (samsat corner), dan inovasi baru lainnya.

Dalam rangka pengembangan Informasi Teknologi (IT), Bapenda Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun strategi, kebijakan dan SOP pengelolaan Informasi Teknologi dimaksud. Dalam jangka waktu lima tahun mendatang akan dilakukan tahap-tahap penataan IT. Hal pertama dan mendesak adalah membenahi SIM-SAMSAT yang kemudian didukung SIM lainnya menjadi SIM-PATDA.

5. Kondisi sarana dan prasarana

Gambaran kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan 21 UPTB/Samsat Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah dibidang pengelolaan pendapatan daerah terutama dalam hal pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang pengelolaannya langsung dilaksanakan oleh Bapenda Prov. Sumsel melalui UPTB Kab/Kota hingga tahun 2018 kondisinya secara menyeluruh masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.

Sebagai pusat pelayanan langsung kepada masyarakat, kondisi ideal setiap UPTB/samsat Bapenda dalam kondisi yang baik dimana pelayanan kepada wajib pajak diberikan secara prima. Salah satu faktor pendukung pelayanan yang prima adalah memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pemenuhan sarana dan prasarana yang baik sesuai standar, seperti ruang tunggu wajib pajak yang nyaman, bersih, tenang, luas tidak berdesak-desakan dan sejuk, merupakan salah satu cara yang tepat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik itu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Walaupun penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi dalam pelaksanaan pemungutannya masih mengalami hambatan/permasalahan, antara lain :

- 1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dispenda Prov. Sumsel belum optimal.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah yang berada di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel dan UPTBKab/Kota masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.
- 3) Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan Dispenda Prov. Sumsel dengan pihak ketiga terkait upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel.
- 4) Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui *show room* yang belum melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II).
- 5) Masih adanya kendaraan bermotor asal luar provinsi dengan Nopol Non BG, yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel dan belum melakukan mutasi Kendaraan.
- 6) Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang masih belum optimal.
- 7) Perkembangan BUMD belum menggembirakan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil.
- 8) Tidak transparannya data tentang produksi minyak dan gas yang diproduksi dari Provinsi Sumatera Selatan sehingga penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas belum optimal.
- 9) Adanya keengganan wajib pajak alat berat membayar pajak terkait adanya perubahan undang-undang tentang alat berat

b. Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap.
- 3) Sinergitas dengan mitra kerja
 - ✓ Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - ✓ Kegiatan penagihan pajak secara langsung melalui Tim OPAD;
 - ✓ MoU dengan mitra kerja, seperti BP-Batan, Dirjen Pajak, BPH Migas, Bank Sumsel Babel, dan sebagainya.
- 4) Mengembangkan/menambah tempat-tempat pelayanan pembayaran PKB/BBNKB antara lain pembentukan Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Mall/Corner dan Samsat Kelurahan/Desa.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan primamelalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB, seperti:
 - ✓ Menyediakan ruang ibu menyusui dan area bermain anak;
 - ✓ Ruang khusus untuk masyarakat rentan;
 - ✓ Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis;
 - ✓ Menyediakan pojok baca bagi Wajib Pajak;
 - ✓ dan sebagainya.
- 6) Memperkuat sistem informasi teknologi;
- 7) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- 8) Menghimbau pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan plat non BG yang beroperasi diwilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk memutasikan kendaraan ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- 9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah, khusus pajak alat berat telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengambil langkah untuk mengeluarkan surat edaran tentang masih dipungutnya pajak alat berat terhitung sampai peraturan baru disahkan.

7. Hal- hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.9.849.942.842.746,55 dan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp.9.280.742.072.448,62 atau 94,22%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang telah ditetapkan atau 101,68%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti pajak daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 102,40%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 131,77% dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 100,70% dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 93,25%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

	U R A I A N	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	(%)
I	PENDAPATAN DAERAH	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,62	94,22
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,62	101,68
A	PAJAK DAERAH	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,38	102,40
	P K B	905.040.000.000,00	979.347.884.263,00	108,21
	-PKB R2/R4	900.000.000.000,00	974.117.378.669,00	108,24
	-PKB Alat Berat	4.800.000.000,00	4.986.889.104,00	103,89
	-PKAA	240.000.000,00	243.616.490,00	101,51
	BBN - KB	913.245.000.000,00	932.817.466.919,00	102,14
	-BBN-KB R2/R4	910.000.000.000,00	929.917.321.275,00	102,19
	-BBN-KB Alat Berat	3.170.000.000,00	2.870.674.594,00	90,56
	-BBN-KAA	75.000.000,00	29.471.050,00	39,29
	PBB - KB	760.000.000.000,00	831.263.590.286,08	109,38
	PAP	10.965.000.000,00	12.323.588.808,30	112,39
	PAJAK ROKOK	482.534.718.796,00	389.806.104.063,00	80,78
B	RETRIBUSI DAERAH	9.136.079.600,00	12.038.355.783,00	131,77
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	89.676.728.820,00	90.304.005.859,82	100,70
D	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	266.231.376.530,55	246.609.857.269,42	92,63
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	6.381.903.769.000,00	5.765.176.417.582,00	90,34
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00	90,23
A	BAGI HASIL PAJAK	860.077.454.680,00	763.869.161.523,00	88,81
B	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	1.353.654.217.320,00	931.599.821.119,00	68,82
C	DANA ALOKASI UMUM	1.743.742.960.000,00	1.743.742.960.000,00	100,00
D	DAK FISIK	267.864.216.000,00	231.438.283.947,00	86,40
E	DAK NON FISIK	2.090.089.683.000,00	2.028.050.952.993,00	97,03
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT LAINNYA	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	100,00
	DANA PENYESUAIAN (Dana Insentif Daerah)	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	100,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SYAH	31.210.170.000,00	21.054.801.615,00	67,46
A	PENDAPATAN HIBAH	30.253.041.000,00	20.415.551.615,00	67,48
B	PENDAPATAN LAINNYA	957.129.000,00	639.250.000,00	66,79

Data Audit BPK

Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 meningkat sebesar Rp.139.370.677.348,83 atau 1,52% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018, seperti tabel berikut.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumsel Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Realisasi		Tambah/Kurang	%
		2018	2019		
1	Pendapatan Asli Daerah	3.528.010.712.183,54	3.494.510.853.251,62	(33.499.858.931,92)	(0,95)
2	Pendapatan Transfer	5.577.767.500.414,00	5.765.176.417.582,00	187.408.917.168,00	3,36
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.593.182.502,25	21.054.801.615,00	(14.538.380.887,25)	(40,85)
Jumlah Pendapatan Daerah		9.141.371.395.099,79	9.280.742.072.448,62	139.370.677.348,83	1,52

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sumsel tahun 2019 terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp3.436.828.903.746,55 sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp3.494.510.853.251,62 atau 101,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp3.528.010.712.183,54 atau berkurang sebesar Rp31.850.581.478,81 atau 0,95%.

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan penerimaan dari komponen pajak daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) dan Pajak Rokok yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 lalu. Terjadinya penurunan pembelian kendaraan baru menyebabkan penerimaan pajak dari BBNKB menurun. Sementara penurunan penerimaan PBBKB dikarenakan penerimaan dari wajib pungut terbesar yaitu

Pertamina berkurang dan beberapa perusahaan wajib pungut yang tidak ada setoran ditahun 2019. Adapun transfer pajak rokok tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena adanya pemotongan pajak rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

2. Pendapatan Transfer

Bagian Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah). Pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp6.381.903.769.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.765.176.417.582,00 atau 90,34%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp5.577.767.500.414,00 mengalami kenaikan sebesar Rp125.221.730.168,00 atau meningkat sebesar 3,36%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kurang salur pemerintah pusat untuk tahun 2018 yang telah dibayar.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp31.210.170.000,00 terealisasi sebesar Rp21.054.801.615,00 atau 67,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp35.593.182.502,25 maka mengalami penurunan sebesar Rp14.538.380.887,25 atau 40,85% dikarenakan menurunnya pendapatan hibah IPDMIP pada tahun 2019.

b. Hasil yang dicapai

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Selatan sebagai potensi utama dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak secara cepat, tepat dan cermat.
3. Meningkatnya kompetensisumber daya manusia dibidang pelayanan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah, khususnya dalam pelayanan pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor samsat/ UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Mendukung terlaksananya pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan secara maksimal.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2020

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,**

Dra. Hj. NENG MUHAIBA, MM.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196511121995122001